

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan terkendali, serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila laporan ataupun pengaduan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke pengadilan dan mendapat putusan dari hakim yang seadil-adilnya, apakah berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun berupa pemidanaan. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian atau POLRI. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menegakkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat menegawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Dalam kenyataannya, hukum tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi undang-undang. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hal 83.

sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain, dan yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktik disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas.

Berdasarkan hal diatas maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Pendapat di atas dengan jelas menggaris bawahi bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapinya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari

aparatus penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tahap paling awal dalam penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHAP bahwa *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 1 butir ke 4 KUHAP adalah *“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”*. Jadi menurut KUHAP, penyelidik itu hanya polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.¹⁷

Wewenang penyelidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah sebagai berikut :

1) *Penyelidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP :*

- a. *karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. *atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat

¹⁷ Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 51.

3. *mengambil sidik jari dan memotret seorang*
 4. *membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.*
- 2) *Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.*

Penyidikan pada dasarnya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu perkara/ tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang penyidikan tidak diatur secara khusus akan tetapi wewenang penyidik dalam Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP, itulah ruang lingkup penyidikan.

Ruang lingkup penyidikan dalam Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) *Penyidik adalah:*
- a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
 - b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*
- 2) *Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 7

- 1) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
- a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - b. *melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
 - c. *menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
 - d. *melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
 - e. *melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - f. *mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
 - g. *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - h. *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
 - i. *mengadakan penghentian penyidikan;*

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁸

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang

¹⁸ Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

yudisial, tugas preventif, maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*”¹⁹, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP). Pengaturan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 7
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi oleh polisi terdapat di dalam Pasal 16 dan Pasal 18.
3. Hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-

¹⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi luasnya kewenangan yang dimiliki oleh polisi, saat melaksanakan diskresi harus mempertimbangkan *asas plicmatigheid*.²⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi hukumnya maupun dari segi sosiologisnya. Penelitian dan penulisan ini mengambil judul **“PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLRESTA SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun dari permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polresta Surakarta?

²⁰ Muchamad Iksan, “*Diskresi ; Urgensi Dan Pembatasannya Dalam Pelaksanaan Tugas Polri*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 Tahun II (Februari, 1998), Hal 48.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam rangka penyidikan di Polresta Surakarta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polresta Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tugas kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

E. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹

Istilah polisi (Polizei) dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan instansi kepolisian, sedang polisi dalam arti material memberikan jawaban terhadap persoalan – persoalan tugas dan wewenang dalam

²¹ Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, Hal 169-161.

rangka menghadapi bahaya/ gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Istilah kepolisian berasal dari kata *police* yang semula berarti pengawasan belaka, akan tetapi karena tugas tersebut mengandung unsur untuk memaksa terhadap kewajiban publik baik seketika maupun melalui proses, maka selain mengawasi, tugas itu pun mengandung kekuasaan untuk memaksa (dwang).²²

Dalam perkembangan pemerintahan sekarang yang semakin kompleks, istilah kepolisian juga mengalami perkembangan. Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu: *“Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Agar supaya fungsi Kepolisian itu dapat terwujud maka polisi harus melengkapi tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*fungsi preventif*);

²² Muchamad Iksan, “ *Diskresi : Urgensi Dan Pembatasannya Dalam Pelaksanaan Tugas Polri*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 Tahun II (Februari, 1998), Hal 42.

- b. Menegakkan hukum (*fungsi represif*);
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 di atas di dalamnya terdapat tiga (3) komponen utama yang merupakan satu kesatuan utuh. Komponen tugas pokok kepolisian itu meliputi :²³

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Tugas pokok ini dimaksudkan adalah penciptaan atau pengkoordinasian dan pemeliharaan akan rasa aman yang merupakan kebutuhan hakiki, serta suasana dan perilaku tertib dalam masyarakat. Tugas ini memunculkan fungsi yang titik beratnya pencegahan (*preventive function*).

- b. Menegakkan Hukum

Tugas pokok kedua ini titik beratnya pada kegiatan – kegiatan penindakan untuk menjamin tegaknya hukum, dengan pemaksaan – pemaksaan untuk memperoleh ketaatan pada tuhan. Tugas ini memunculkan fungsi yang titik beratnya pemberantasan terhadap pelanggaran hukum (*represif function*).

- c. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan pada masyarakat

Tugas Kepolisian tersebut dapat dikatakan berjalan apabila fungsi kepolisian terwujud, namun tugas pokok Kepolisian Negara tersebut diberikan

²³ Tabloit Mingguan Kontak, Edisi Nomor 40/TH.I/15 Desember-21 Desember 2003.

kewenangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur mengenai wewenang Kepolisian yaitu:

Pasal 15 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;*
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;*
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat (2)

mempunyai wewenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;*
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;*
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;*
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;*
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;*
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;*

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;*
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;*
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;*
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.*

Pasal 16 ayat UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.*
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.*
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.*
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.*
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.*
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.*
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.*
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.*
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.*
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.*
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
- b. *selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
- c. *harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
- d. *pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
- e. *menghormati hak asasi manusia.*

Tugas polisi tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum, melainkan lebih luas lagi, ketentuan pasal 16 ayat (2) diatas berkaitan dengan diskresi kepolisian. Fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian dibagi menjadi tugas dan wewenang yang bersifat umum untuk semua anggota kepolisian, juga tugas dan wewenang yang bersifat khusus bagi penyidik POLRI. Menurut pasal 1 butir ke-2 KUHAP bahwa : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.²⁴

Sedang yang berwenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 dan 3 adalah. Pasal 1 butir 1 bahwa : *“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*. Pasal 1 butir 3 bahwa : *“Penyidik pembantu adalah pejabat*

²⁴ Pasal 1 butir 2 KUHAP

*kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.*²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis tentang diskresi oleh polisi dan pelaksanaan atau praktik diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif²⁷, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang aspek yuridis diskresi oleh polisi dan pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta.

²⁵ Pasal 1 butir 1 dan 3 KUHAP

²⁶ Kudzhaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 13.

²⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.35. “ penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. ”

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di Polresta Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari Kepolisian Resort Kota Surakarta, berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang praktik hukum penerapan diskresi oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang mengatur dan membahas mengenai :

1). Bahan hukum primer, meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2). Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pelaksanaan diskresi oleh polri dalam melakukan penyidikan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

- 3).Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

5. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestigasi,²⁸ menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Studi lapangan

1. Wawancara dengan kepolisian

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa Tanya jawab dengan informan atau narasumber, dalam hal ini yang berkopeten dalam permasalahan yaitu *pertama* KSO Reskrim Polresta Surakarta IPTU Petra Cintya Katoce Tumengkol, SH dan *kedua* Kaur Mintu SatReskrim Polresta Surakarta AIPTU Eko Susanto .²⁹

Adapun daftar pertanyaan atau poin-poin dalam wawancara:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana :

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua 1991. Menginvestigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian tersebut.

²⁹ Ibid Hal 17

- 1) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang diskresi?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan diskresi dalam penyidikan?
 - 3) Bagaimanakah langkah-langkah strategis pelaksanaan diskresi dalam penyidikan?
 - 4) Bagaiman peraturan diskresi berdasarkan perundang-undangan?
 - 5) Apa dasar hukum yang digunakan polisi dalam pelaksanaan diskresi tersebut?
2. Kewenangan pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta?
- 1) Kewenangan apa yang dimiliki polisi dalam penyidikan?
 - 2) Hal apa saja yang membatasi polisi dalam penyidikan?
 - 3) Berapa data yang masuk pada proses peradilam pidana di Polresta Surakarta?
 - 4) Kapan kewenangan polisi saat penyidikan harus dihentikan?
 - 5) Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat polisi sering menggunakan hukum tidak tertulis/adat setempat untuk dijadikan pedoman dalam menerapkan diskresi sebutkan contoh hukum tidak tertulis tersebut?
 - 6) Dalam penerapan diskresi ada beberapa ukuran atau indikator, polisi untuk menentukan perkara pidana itu bisa dilanjutkan atau tidak, sebutkan?

3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polresta Surakarta?

- 1) Apa alasan polisi melakukan diskresi?
- 2) Apa hambatan polisi dalam pelaksanaan diskresi?
- 3) Bagaimana peranan atasan dalam pembinaan pelaksanaan diskresi?
- 4) Bagaimana solusi hambatan dalam pelaksanaan diskresi?

2. Observasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa kegiatan mengamati pelaksanaan diskresi oleh polisi dan pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta.

6. Metode analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.³⁰ Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan diskresi oleh polisi

³⁰ Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Bandung: Taristo, Hal 16.

dalam penyidikan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan dalam kenyataannya.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari empat sub-bab, yaitu meliputi tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang diskresi, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang hubungan hukum acara pidana dan ham.

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data, pada bab ini menjelaskan tentang peraturan yang menjadi dasar diskresi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polresta Surakarta.

Bab IV penutup, berisi simpulan dan saran